

## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Climate change* atau perubahan iklim merupakan berubahnya parameter-parameter iklim berupa curah hujan dan suhu secara statistik dalam interval waktu atau periode tertentu. Salah satu dampak *climate change* adalah perubahan pola dan intensitas pada berbagai parameter iklim yaitu terjadinya curah hujan yang tidak menentu dan pergeseran awal serta panjang musim yang menyimpang ataupun suhu ekstrem dibandingkan dengan kondisi normalnya.<sup>(1)</sup> *Climate change* akan berdampak negatif bagi alam serta kehidupan makhluk hidup, salah satunya yaitu terjadi penurunan kualitas serta kuantitas air.

Menurunnya pasokan air baik kualitas maupun kuantitasnya telah menjadi masalah global, disebabkan oleh meningkatnya populasi, perkembangan kegiatan industri serta pertanian, serta perubahan iklim yang ekstrem.<sup>(2)</sup> Bank dunia memaparkan bahwa sebanyak 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih di dunia.<sup>(3)</sup> Sekitar 700 juta orang di 43 negara menderita penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk dan kuantitas air yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rata-rata jangka panjang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi di dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi.<sup>(4)</sup>

Salah satu negara yang sudah mengalami masalah menurunnya kualitas serta kuantitas air yaitu California. California mengalami *water crisis* akibat kemarau panjang. Pemerintah dan masyarakat dinilai kurang siap dalam menghadapi krisis air yang terjadi. Penggunaan air di sistem regional salah satu kota di California yaitu San

Francisco harus dikurangi sebanyak 10%. Sumber utama pasokan air yang ada di California yaitu Sungai Colorado juga mengalami kekeringan.<sup>(5)</sup> Melihat alternatif lainnya yaitu air tanah yang juga mengalami kekeringan pada sumur masyarakat akibat kebutuhan masyarakat yang meningkat dan terus-menerus menggunakan air tanah.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, pada tahun 2025 terdapat ancaman terkait kelangkaan air yaitu 1,8 miliar orang akan tinggal di wilayah dengan kualitas air yang buruk, dan dua pertiga dari penduduk dunia akan hidup dengan kondisi kualitas air yang buruk. Hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan kekurangan air pada tahun 2030, termasuk sekitar 75 juta hingga 250 juta orang di Afrika.<sup>(2)</sup>

Berdasarkan *Asia and The Pacific SDG Progress Report 2022*, Asia memiliki konsentrasi global yang paling signifikan dari risiko terkait air yaitu kelangkaan air, kekeringan, banjir, pencemaran air, dan akses yang tidak memadai ke layanan air bersih dan sanitasi yang aman. Selain itu, perubahan iklim, urbanisasi pertumbuhan penduduk yang cepat, serta aktivitas industri yang intens merupakan ancaman tambahan bagi ketahanan air di Asia. Kondisi air bersih di Asia Tenggara yang dipaparkan dalam *Asia and The Pacific SDG Progress Report 2022* yaitu adanya kecenderungan terbalik dari target yang telah ditetapkan pada poin air bersih dan sanitasi. Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan pasokan kebutuhan air bersih tetapi negara tidak mampu melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air.<sup>(6)</sup>

Indonesia merupakan salah satu bagian dari Asia Tenggara yang memiliki permasalahan air yang kompleks.<sup>(7)</sup> Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.<sup>(8)</sup> Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah

269,6 juta jiwa.<sup>(9)</sup> Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yaitu 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada 2010. Meningkatnya populasi dan penduduk yang tersebar di berbagai wilayah menjadi salah satu penyebab tidak meratanya akses air bersih.

Pada kondisi saat ini, pemerintah Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman.<sup>(10)</sup> Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 mencatat Indonesia telah mencapai 90,2% akses air minum layak, termasuk 20,7% dengan jaringan perpipaan.<sup>(11)</sup> Menurut laporan pelaksanaan SDGs Bappenas, hanya 11,9% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 rumah tangga yang telah menikmati air minum aman yang telah memenuhi syarat kualitas air minum.<sup>(12)</sup> Berdasarkan hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2020, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri *Escherichia coli (E-coli)*.<sup>(13)</sup>

Tidak meratanya akses air di seluruh Indonesia menyebabkan adanya ketimpangan pasokan air. Ketimpangan ini nantinya dapat menyebabkan kekurangan air bersih bahkan sampai tidak memiliki pasokan air bersih. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan air pada masyarakat. Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, kelangkaan air adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dengan penurunan kualitas serta kuantitas sumber daya air.<sup>(14)</sup> Penyebab terbesar ancaman kelangkaan air di Indonesia yaitu *climate change*. Pemanasan global yang terjadi di Indonesia dengan suhu permukaan meningkat dari 0,2 menjadi 0,3 derajat Celcius per dekade. Hal ini menyebabkan perubahan curah hujan di Indonesia yang berdampak akan terjadinya kekeringan.<sup>(15)</sup>

Berdasarkan SKAMRT Indonesia tahun 2020, pada Pulau Sumatera terdapat 83,7 % air minum tidak aman yang digunakan masyarakat apabila ditinjau dari kadar *e-coli* dan 93,6% air minum tidak aman yang digunakan masyarakat apabila ditinjau dari kontaminasi *Total Dissolved Solids* (TDS), *e-coli*, derajat keasaman (pH), Nitrat, dan Nitrit.<sup>(16)</sup> Berdasarkan laporan pelaksanaan SDGs, hanya 6,4% rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman di Pulau Sumatera.<sup>(12)</sup>

Sumatera barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Ibukota Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang dan juga menjadi kota dengan penduduk terbanyak di Sumatera Barat. Kota Padang termasuk dalam salah satu daerah dataran rendah di Sumatera Barat. Hasil penelitian Sugeng, dkk mengenai analisis iklim ekstrem untuk deteksi perubahan iklim di Sumatera Barat yang salah satunya dilakukan di Kota Padang menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan suhu udara baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, sedangkan untuk curah hujan rata-rata lebih rendah pada dataran rendah dan sebaliknya pada dataran tinggi.<sup>(17)</sup>

Ancaman kelangkaan air bersih di Kota Padang dapat terjadi di berbagai wilayah. Masyarakat yang tinggal di pinggir kota tidak terjangkau oleh jaringan perpipaan serta masyarakat kota yang tidak memiliki pasokan air yang cukup. Berdasarkan kondisi yang ada, salah satu wilayah yang rentan mengalami ancaman kelangkaan air yaitu wilayah kumuh perkotaan. Wilayah kumuh perkotaan adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan struktur bangunan, bangunan yang padat dan rapat, dan bangunan dan sarana prasarana yang kualitasnya tidak memenuhi syarat.<sup>(18)</sup> Untuk menetapkan suatu daerah termasuk pada kawasan kumuh, maka telah ditetapkan 7 kriteria kekumuhan. Salah satu kriterianya yaitu



kondisi penyediaan air minum yang memiliki 2 parameter yaitu akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum setiap individu tidak terpenuhi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 519 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat 22 kelurahan yang termasuk dalam perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Padang.<sup>(19)</sup> Dari keseluruhan jumlah wilayah kumuh perkotaan masing-masing Kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota yang memiliki wilayah kumuh perkotaan terbanyak di Sumatera Barat.

Lokasi wilayah kumuh perkotaan yang jauh dari pusat kota menyebabkan banyak keterbatasan sarana dan prasarana yang mencukupi. Penyediaan air di wilayah kumuh perkotaan memiliki keterbatasan yang berbeda-beda pada masing-masing lokasinya. Keterbatasan yang biasa terjadi yaitu tidak adanya akses penyaluran air yang layak pada rumah masyarakat, tidak tersedianya sumber air yang layak pada permukiman, serta tidak tersedianya jaringan perpipaan ke suatu permukiman.

Penilaian wilayah kumuh perkotaan juga dilandasi oleh pertimbangan lain yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pertimbangan lain diidentifikasi melalui aspek nilai strategis lokasi, kependudukan, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Pada masing-masing kategori, terdapat wilayah yang memiliki angka penyediaan air minum yang rendah. Wilayah yang memiliki angka penyediaan air minum yang rendah pada kategori rendah yaitu Kelurahan Padang Sarai, Piai Tengah, dan Banuaran. Ketersediaan air pada Kelurahan Padang Sarai yaitu hanya 50%, Kelurahan Piai Tengah yaitu 66,67%, dan Kelurahan Banuaran yaitu 77,33%. Wilayah pada kategori sedang yang memiliki penyediaan air yang rendah yaitu Kelurahan Pisang, Teluk Kabung Selatan, dan Koto Lalang. Ketersediaan air pada Kelurahan Pisang yaitu 50%, Teluk Kabung Selatan yaitu 50,76%, dan Koto Lalang

yaitu 51,22%. Wilayah pada kategori tinggi yang memiliki penyediaan air yang rendah yaitu Kelurahan Batipuh Panjang, Bungus Timur, dan Anduring. Ketersediaan air pada Kelurahan Batipuh Panjang yaitu 50,76%, Bungus Timur yaitu 82,53%, dan Anduring yaitu 79,73%.<sup>(19)</sup>

Minimnya ketersediaan air bersih di permukaan membuat air tanah menjadi sumber utama dalam kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sekitar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah. Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan, aliran air tanah di dalam akuifer membutuhkan waktu lama hingga ribuan tahun tergantung jarak dan jenis batuan. Oleh karena itu, meskipun air tanah bersifat dapat diperbaharui, tetapi jika dikomparasikan dengan periode hidup manusia, air tanah juga dapat digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.<sup>(20)</sup>

Penggunaan air tanah biasanya berasal dari sumur. Sumur yang umumnya digunakan pada permukiman yaitu sumur dangkal. Sumur dangkal disarankan terletak di tempat yang aliran air tanahnya tidak tercemar. Apabila sumur berada di hulu aliran air tanah, setidaknya berjarak 10-15 meter dari sumber pencemaran tersebut. Apabila kedalaman 3 meter masih mengandung kuman dan apabila sudah lebih dikatakan bersih dari kuman.<sup>(21)</sup> Pencemaran yang terjadi pada sumber air tanah juga disebabkan lokasinya dekat dengan sumber pencemar serta ekstraksi yang berlebihan dalam tanah.<sup>(2)</sup> Pada kondisi di lapangan, tidak tersedianya *septic tank* serta jarak *septic tank* yang terlalu dekat dengan sumur akan berpengaruh pada kualitas air tanah. *Septic tank* yang jaraknya dekat dengan muka air tanah tidak mampu menyaring limbah tinja dan akan berdampak pada kualitas air di sekitarnya.<sup>(22)</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Achmad, dkk menyatakan bahwa adanya hubungan jarak *septic tank* dan kandungan *e-coli* air sumur gali.<sup>(23)</sup>

Minimnya pasokan penyediaan air bersih yang salah satunya digunakan untuk menjaga kebersihan diri, dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai *waterborne disease* atau *water related disease*. Menurut Volk & Wheeler, penyakit yang disebut *waterborne disease* antara lain kolera, *typhoid fever*, *paratyphoid fever*, disentri basiler, gastroenteritis, diare, dan leptospirosis. Dan yang sering menimbulkan endemi yaitu kolera, *typhoid*, dan *paratyphoid fever*.<sup>(24)</sup>

Ancaman kelangkaan air akan menimbulkan risiko dan akibat yang besar bagi masyarakat, maka langkah kesiapsiagaan merupakan langkah awal yang tepat dalam mengurangi risiko dan akibat tersebut. Kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.<sup>(25)</sup> Kesiapsiagaan berperan penting dalam menghadapi suatu bencana karena dapat mengurangi adanya korban jiwa, mengurangi potensi terganggu kondisi psikologis masyarakat, dan dapat menekan risiko bencana tersebut sekecil-kecilnya. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR terdapat 5 parameter kesiapsiagaan yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana keadaan darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya.<sup>(26)</sup>

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Efendi, dkk mengenai hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga dengan kesiapsiagaan ibu hamil dan keluarga menghadapi erupsi gunung agung dengan *p value* (0,000) yang menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dan kesiapsiagaan ibu hamil dan keluarga dalam menghadapi bencana.<sup>(27)</sup>

Faktor yang juga dapat berpengaruh terhadap kesiapsiagaan yaitu tingkat ekonomi masyarakat. Setiap terjadinya peningkatan pada tingkat sosial ekonomi, akan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Penelitian yang dilakukan Heri Nurcahyo menyatakan bahwa tingkat sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir.<sup>(28)</sup>

Faktor lainnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana merupakan salah satu yang ikut menentukan baik dan kurangnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta dengan ketersediaan sarana prasarana yang kurang akan berdampak pada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana bahkan dapat menyebabkan kekacauan dalam menghadapi ancaman bencana. Hasil penelitian Indriani, Yusran, dan Yaniar mengenai analisis faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan masyarakat menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dengan *p value* (0,00) yang memiliki hubungan yang bermakna dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.<sup>(29)</sup>

Faktor lainnya yaitu pengawasan, yang termasuk ke dalamnya yaitu pengawasan instansi terkait dan pengawasan tokoh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Qirana menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan petugas dengan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi bahaya dengan *p value* (0,002).<sup>(30)</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Balqis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan kebakaran pada petugas operator SPBU di Kota Bukittinggi tahun 2022 dengan *p value* (0,009) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengawasan dengan tingkat kesiapsiagaan.<sup>(31)</sup>



Survei awal telah dilakukan pada 10 rumah yang terdapat pada 3 kelurahan yaitu Kelurahan Anduring, Kelurahan Pisang, dan Kelurahan Piai Tengah. Hasil survei awal menunjukkan bahwa masyarakat memiliki nilai indeks kesiapsiagaan 42,02 dengan kategori tingkat kesiapsiagaan yang rendah. Sebanyak 90% responden memiliki pengetahuan yang rendah serta 60% responden yang memiliki rencana kesiapsiagaan yang rendah. Sebanyak 90% memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terkait peringatan bencana dan 10 dari 10 responden memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terkait mobilisasi sumber daya apabila terjadinya kelangkaan air. Hanya 40% responden yang menyadari bahwa wilayah tempat tinggal responden memiliki potensi ancaman kelangkaan air.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi lingkungan pada masing-masing kelurahan berbeda. Pada Kelurahan Anduring, wawancara dilakukan pada Ketua Rukun Tetangga (RT) yang memaparkan bahwa seluruh masyarakat menggunakan sumur sebagai sumber air bersih utama dan tidak dilengkapi dengan jaringan perpipaan. Hal ini menyebabkan pernah terjadinya kekurangan pasokan air saat kemarau. Pada Kelurahan Pisang, tiga masyarakat yang menjadi responden memaparkan menggunakan air sumur sebagai sumber air bersih utama dan juga belum dilengkapi oleh jaringan perpipaan. Responden menyatakan bahwa kendala dari penggunaan air sumur ini yaitu air sumur yang tidak jernih dan berwarna kekuningan. Pada Kelurahan Piai Tengah, dua masyarakat yang menjadi responden memaparkan bahwa menggunakan air sumur sebagai sumber air bersih utama dan tidak terjangkau oleh jaringan perpipaan. Responden menyatakan bahwa kendala yang dialami dari penggunaan air sumur yaitu air sumur berbau dan kurang bersih. Selain itu, pernyataan responden yang terdiri dari masyarakat dan Ketua RT yaitu tidak adanya pengawasan rutin dan informasi mengenai potensi ancaman kelangkaan air dari instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang dan uraian penjelasan di atas, maka diperlukan penelitian terkait “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesiapsiagaan terhadap Kelangkaan Air di Wilayah Kumuh Perkotaan Kota Padang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang?”.

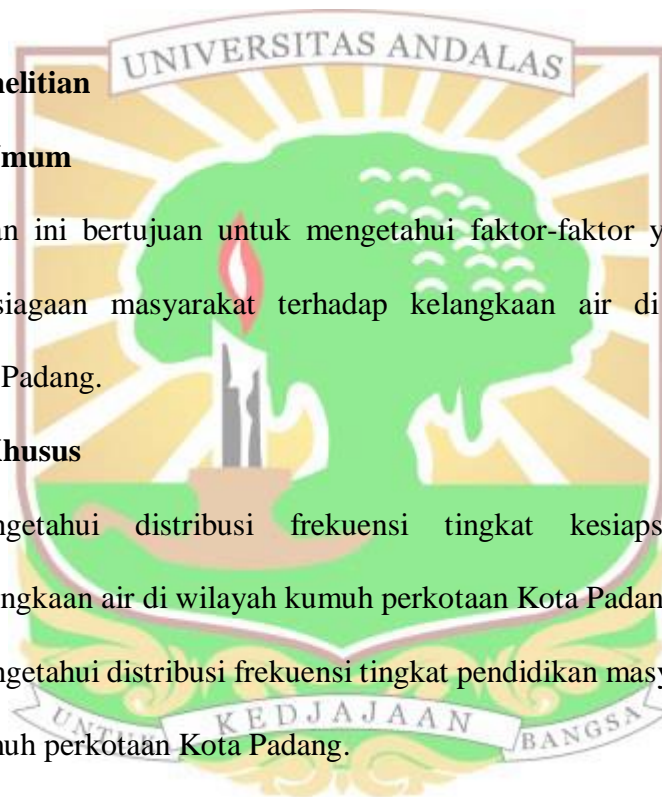
## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
2. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
3. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat ekonomi masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
4. Mengetahui distribusi frekuensi ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
5. Mengetahui distribusi frekuensi pengawasan di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.



6. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air pada masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
7. Mengetahui hubungan tingkat ekonomi dengan tingkat kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air pada masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
8. Mengetahui hubungan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tingkat kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air pada masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.
9. Mengetahui hubungan pengawasan dengan tingkat kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air pada masyarakat di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang K3 & Kesehatan Lingkungan serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

##### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam penyusunan karya ilmiah serta menerapkan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

### 1.4.3 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelangkaan air serta dapat menjadi acuan dalam pengembangan jaringan perpipaan di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

#### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait ancaman kelangkaan air pada wilayah kumuh perkotaan Kota Padang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan meningkatkan kesadaran mengenai kelangkaan air serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kelangkaan air.

#### 3. Bagi Peneliti

Adapun bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman peneliti mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air di wilayah kumuh perkotaan Kota Padang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi *cross sectional*. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan pengawasan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesiapsiagaan terhadap kelangkaan air. Untuk pemilihan sampel menggunakan teknik *proportional random sampling*. Total populasi dalam



penelitian ini yaitu 3.354 KK dan sampel dalam penelitian ini yaitu 102 KK. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dengan parameter tingkat kesiapsiagaan yang dikembangkan oleh LIPI-UNESCO-IDR. Data sekunder didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang serta menggunakan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga Juli 2023. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Analisis yang digunakan pada analisis bivariat yaitu Uji Regresi Logistik Ordinal.

